



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

| | |
|------------------|--|
| Tahun Sidang | : 2019 – 2020 |
| Masa Sidang | : IV |
| Jenis Rapat | : Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) |
| Hari/Tanggal | : Rabu, 8 Juli 2020 |
| Sifat | : Terbuka |
| Pukul | : 13.00 WIB s.d Selesai |
| Tempat | : Ruang Rapat BAKN DPR RI Gedung Nusantara I Lt. 1 |
| Acara | : Dalam rangka mendapatkan masukan terkait dengan kebijakan pengelolaan subsidi energi listrik, BBM, dan gas. |
| Ketua Rapat | : I Gusti Agung Rai Wirajaya, S.E.,M.M. |
| Sekretaris Rapat | : Mardi Harjo, S.E.,M.Si |
| Hadir Pimpinan | : 3 dari 3 orang Pimpinan BAKN DPR RI |
| Hadir Anggota | : 3 dari 6 Anggota BAKN DPR RI |
| Hadir Tamu | : Ketua Umum Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), dan Ketua Persatuan Nelayan dan Tani Indonesia (PNTI) beserta para jajarannya. |

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAKN DPR RI, dipimpin oleh Wakil Ketua BAKN DPR RI, Bpk. I Gusti Agung Rai Wirajaya, S.E.,M.M, dan dibuka pada pukul 13.15 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda RDPU pada hari ini adalah dalam rangka mendapatkan masukan terkait dengan kebijakan pengelolaan subsidi energi listrik, BBM dan gas.
3. Ketua Rapat mempersilahkan kepada HNSI, HKTI dan PNTI untuk menyampaikan masukannya terkait dengan kebijakan pengelolaan subsidi energi listrik, BBM, dan gas.
4. Ketua Rapat mempersilahkan kepada Pimpinan dan Anggota BAKN DPR RI untuk menyampaikan usulan atau tanggapan terhadap agenda rapat pada hari ini sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pimpinan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

Berdasarkan hasil RDPU antara BAKN DPR RI dengan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), dan Persatuan Nelayan dan Tani Indonesia (PNTI) terkait masukan tentang kebijakan pengelolaan subsidi energi, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan dan masukan diantaranya sebagai berikut :

1. Himpunan Kelompok Tani Indonesia (HKTI):
 - a. Masih adanya keterbatasan akses untuk mendapatkan subsidi BBM, khususnya bagi para pengguna/konsumen yang berdomisili di daerah terpencil. Terbatasnya agen-agen penyalur di daerah terpencil membuat sebagian besar masyarakat pedesaan sulit mendapatkan subsidi energi, baik itu energi BBM maupun gas secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan adanya perluasan penyediaan agen-agen di setiap daerah-daerah terpencil..
 - b. Perlunya pengkajian ulang terhadap peraturan pemerintah terkait dengan subsidi energi BBM, khususnya mekanisme dalam penyaluran subsidi energi BBM yang ada kaitannya dengan luas lahan.
 - c. Perlunya memaksimalkan fungsi Kartu Tani dalam rangka mendapatkan subsidi BBM bagi para petani, mengingat masih banyaknya petani yang mendapatkan BBM bersubsidi namun tidak dengan harga yang bersubsidi.
 - d. Pertamina merupakan suatu langkah yang dapat dikembangkan untuk dikelola agar subsidi BBM dapat diterima oleh petani secara tepat sasaran.
 - e. Adanya ketidaksesuaian antara data birokrasi dan data yang ada di lapangan/data penerima subsidi energi yang terkait dengan permasalahan-permasalahan petani, baik dari data jumlah petani dan luas lahan, yang akhirnya berpengaruh kepada ketidaktepatan sasaran alokasi subsidi energi. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat mempertimbangkan untuk menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Data Amnesty.
2. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI):
 - a. Para nelayan masih sangat membutuhkan subsidi dari pemerintah, untuk pemberdayaan, peningkatan pendapatan dan taraf hidupnya.
 - b. Sasaran subsidi energi masih banyak yang belum tepat. Alokasi subsidi energi yang belum maksimal menyebabkan sebagian besar masyarakat nelayan tidak menikmati subsidi energi BBM yang disediakan oleh Pemerintah.

- c. Masih terbatasnya subsidi yang diberikan pemerintah untuk kelompok nelayan yang dapat dilihat dari perbandingan antara total kapal ikan dengan total subsidi BBM secara keseluruhan masih belum seimbang. Hal itu menyebabkan rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan Indonesia. Oleh karena itu, nelayan Indonesia masih sangat membutuhkan dan perlu adanya peningkatan alokasi subsidi energi BBM tanpa memandang GT. juga subsidi pakan, benih dan obat-obatan untuk nelayan budidaya.
 - d. Diperlukan penambahan SPDN/SPBB diseluruh sentra-sentra nelayan diseluruh Indonesia, yang idealnya berjumlah 2.000 SPDN/SPBB.
 - e. Terkait pendistribusian BBM Subsidi untuk nelayan agar dapat disalurkan khusus, tanpa melalui alokasi Provinsi atau Kabupaten/Kota dan langsung disalurkan kepada SPDN/SPBB sesuai kebutuhan nelayan di lokasi tersebut. Disamping itu mengharapkan agar PT. Pertamina memberikan kemudahan dan keringanan untuk membangun SPDN/SPBB serta BPH Migas dalam memberikan alokasinya sesuai kebutuhan nelayan.
3. Persatuan Nelayan dan Tani Indonesia (PNTI):
- a. Masih terdapat ketidakefisienan dan ketidakefektifan dalam penyaluran alokasi subsidi energi BBM. Perlu adanya perbaikan mekanisme alokasi subsidi energi BBM, agar kelompok nelayan dan kelompok tani bisa menikmati subsidi energi BBM secara merata.
 - b. Keterbatasan akses penyedia subsidi energi hingga ke tempat nelayan. Jauhnya agen-agen penyedia subsidi energi membuat para nelayan kesulitan dalam menjangkau BBM maupun gas bersubsidi. Oleh karena itu, perlu adanya penambahan sarana SPBN khususnya di daerah-daerah terpencil baik solar maupun premium terkhusus di daerah sentra-sentra perikanan khususnya Indonesia Timur.
 - c. Perlunya perbaikan akses jalan menuju SPBN sehingga mobil tangki dapat mengisi dengan optimal
 - d. Diperlukan adanya pemberlakuan harga BBM khusus bagi nelayan pada SPBU.
 - e. Meminta kepada pemerintah agar dapat meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana BBG, jika ingin mengkonversi BBM ke BBG khusus bagi para nelayan serta peran aktif pemerintah dalam menyikapi harga dan ketersediaan stok BBM.
4. Keterbukaan informasi serta data yang mumpuni dari penerima subsidi terkait permasalahan – permasalahan subsidi energi yang terjadi di setiap daerah masing-masing, untuk memaksimalkan fungsi pengawasan BAKN DPR RI kaitannya dengan subsidi energi oleh Pemerintah.

5. Ketimpangan subsidi energi terkesan sistematis. Volume subsidi energi, baik energi BBM, listrik, dan gas dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal itu bertolak belakang dengan tingkat kemiskinan masyarakat Indonesia yang menurun. Berdasarkan dengan hal tersebut, dengan jelas, ada ketimpangan-ketimpangan terkait pendistribusian subsidi energi.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.30 WIB.

Jakarta, 8 Juli 2020

KETUA RAPAT,



I GUSTI AGUNG-RAI WIRAJAYA, S.E.,M.M

A-234